

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dan analisis untuk menjawab Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dibahas dan di analisis berdasarkan indikator dengan menggunakan teori Efektivitas Organisasi menurut Duncan dalam Steers (2015) membahas terkait Efektivitas Organisasi yang akan disajikan berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: 1) Pencapaian Tujuan, 2) Integrasi, 3) Adaptasi.

5.1 Efektivitas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta Timur

5.1.1 Pencapaian Tujuan

Suatu program dapat dievaluasi dengan efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi. Dari tugas tersebut diketahui bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban ikut serta menjaga, merawat dan menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Salah satu indikator untuk mengetahui efektivitas organisasi adalah dengan mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di Jakarta Timur.

Menurut Duncan dalam Steers (2015) “Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses”. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara diketahui

bahwa untuk mencapai tujuannya, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah melakukan Langkah-langkah yang tepat, Kesbangpol mengadakan sosialisasi mengenai program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, edukasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, turun langsung ke masyarakat dengan koordinasi melalui RT dan RW setempat. Kesbangpol juga melakukan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui seminar ilmiah pada komunitas kepemudaan lintas etnis dan agama baik yang diprogramkan oleh Kesbangpol maupun yang diinisiasi oleh organisasi kepemudaan. Sampai saat ini Langkah yang dilaksanakan tersebut sudah berjalan cukup efektif dengan kurun waktu pencapaian yang sesuai, sasaran yang tepat dan berdasarkan dasar hukum yang sudah ditetapkan.

Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu dilakukan juga penguatan kelembagaan politik yang ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Adapun pemulihan wilayah konflik, stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah.

Selain mengadakan program adanya beberapa permasalahan perlu diantisipasi terutama terkait dengan ekses yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Peningkatan partisipasi politik masyarakat, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stake holder (Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

Peran penting kesbangpol dalam membangun kerukunan merupakan agenda nasional yang perlu dikerjakan oleh instansi pemerintah secara efektif dan efisien.

Kesbangpol juga memiliki peran mengawasi dan memantau jangan sampai agama dimanipulasi serta dieksploitasi untuk pembenaran bagi kepentingan sesaat politik praktis dan pragmatis dari partai politik (Kemenag, 2018). Peran kesbangpol dalam perspektif kerukunan beragama harus terarah dan bertujuan pada upaya menjaga agar setiap agama dilindungi dan dijaga sehingga meminimalisir dan mencegah tindakan diskriminasi atau dikotori mayoritas dan minoritas dalam negara demokratis. Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, dalam pidato pembukaan peringatan hari jadi ke-96 Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) ia menegaskan bahwa, “setiap umat beragama harus mampu menjaga nilai-nilai kualitas dan integritas sebagai manusia karena setiap agama memiliki banyak persamaan, terutama terkait nilai-nilai universal, setiap agama sama-sama mengajarkan kepribadian dan iman” (Sulistiyo, 2019).

Dari uraian di atas diketahui bahwa pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan serangkaian proses yang dilaksanakan dan dapat dilihat dari mulai tahap perencanaan yang matang, tahap pelaksanaan yang baik dan target yang diinginkan tercapai. Dengan demikian pencapaian tujuan sudah dinilai efektif sesuai dengan definisi pencapaian tujuan dari Duncan dalam Steers (2015), dimana pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Hal ini sesuai pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Prsaetyaningrum (2022) dimana pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut konsep teori peran serta strategi komunikasi politik komunitas beragama, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah berperan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antara umat beragama di Kota Semarang dalam kurun waktu 2019-2021. Hal ini sesuai dengan peran Kesbangpol dalam menciptakan kebijakan kerukunan antar umat beragama.

5.1.2 Integrasi

Integrasi dilihat dari kemampuan integrasi program dalam menyelaraskan sikap/perilaku stake holder. Kemampuan program menjadi wadah untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat Kemampuan program sebagai simpul

kerjasama berbagai pihak. Selain itu, integrasi juga dapat dilihat dari kemampuan program menjadi wadah untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat dan kemampuan program sebagai simpul kerjasama berbagai pihak yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan dan infrastruktur. Kemampuan integrasi program pada tahapan sosialisasi dapat diamati dari tercapainya partisipasi stake holder dan keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam tahapan sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi Kesbangpol berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan dari berbagai agama yang ada di wilayah Jakarta Timur, dengan begitu masyarakat akan lebih merasa diperhatikan khususnya bagi kaum minoritas.

Dalam melakukan sosialisasi mengenai program kerukunan umat beragama di wilayah Jakarta Timur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan berkala dan berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan menjaga dan merawat kerukunan hidup umat beragama, secara sistematis dan komprehensif menjangkau seluruh stakeholder serta terus menjaga dan memelihara komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, ORMAS, perangkat RT/RW, melakukan kampanye, himbuan dan terlibat gerakan mandiri merawat dan menjaga kerukunan beragama ditengah masyarakat, serta memberi perhatian khusus terhadap edukasi dan kepedulian generasi muda terhadap isu pentingnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan integrasi ini sudah dapat dijalankan oleh Kesbangpol dalam memandu masyarakat, partai politik, ormas dan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui pendekatan atau strategi kemitraan bersama instansi-intansi terkait dan semua lembaga pemerintahan daerah sehingga mampu meredam konflik berbau SARA dan menjaga stabilitas keamanan, kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Meskipun dalam beberapa peran dan tugas belum maksimal mewujudkan tujuan bersama secara progresif. Secara skematis peran keseimbangan badan Kesbangpol dapat tergambar pada skema kerangka konseptual peran keseimbangan Kesbangpol dalam membangun kerukunan masyarakat.

Adanya beberapa konflik yang masih terjadi di Jakarta Timur menunjukkan bahwa kemampuan integrasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih

belum cukup efektif, dimana menurut Duncan dalam Steers (2015) integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum efektif menangkal isu SARA yang terjadi, artinya sosialisasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes (2023), dimana dari hasil penelitiannya diketahui bahwa peran membina kehidupan demokrasi dan keberagaman sosial, Badan Kesbangpol masih belum efektif karena ketidakmampuan Kesbangpol mencegah terjadinya konflik politik dan SARA di tahun 2019-2021.

5.1.3 Adaptasi

Kemampuan adaptasi dan kemampuan antisipasi terhadap segala kemungkinan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat telah dilakukan oleh Suku Badan Kesbangpol melalui penguatan kerjasama dan kolaborasi lintas instansi dan lembaga, bersama masyarakat. Suku Badan kesbangpol melakukan penguatan kerjasama dan kolaborasi lintas instansi dan lembaga, bersama masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemilu maupun pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing yang masuk ke wilayah Jakarta Timur. Mengawasi dan memperketat serta membina dan menguatkan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, dan memperketat fungsi pengawasan terhadap berbagai pengaruh asing maupun penyelundupan barang, manusia dan narkoba atau kejahatan lainnya. Selain itu Suku Badan Kesbangpol juga melakukan pendampingan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat di wilayah Jakarta Timur.

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).

Salah satu konflik yang pernah terjadi yaitu mengenai alih fungsi lahan yang terjadi pada Yayasan Bahtera Sejahtera. Permasalahan ini berawal pada tahun 1990 dimana Yayasan Bahtera Sejahtera membeli tanah fasum dari PD. Pembangunan Sarana Jaya dan selanjutnya mengajukan Izin Membangun Tempat Peribadatan kepada Walikota Administrasi Jakarta Timur, namun tidak bisa terlaksana karena adanya Surat Keterangan Keberatan Warga atas pembangunan dimaksud. Yayasan Bahtera Sejahtera memperoleh IMB No. 4474/IMB/1995 atas tanah tersebut untuk mendirikan bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak, yang pada waktu selanjutnya gedung Sekolah TK tersebut dialih fungsikan menjadi Tempat Peribadatan/ Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Solo Gratia. Walikota Administrasi Jakarta Timur telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penghentian penggunaan kegiatan di Gedung TK. Yayasan Bahtera yang tidak sesuai peruntukannya (No. 158/1.758.3 tanggal 19 Januari 2004). Sejak 2004 kegiatan di lokasi tersebut sudah vakum. Perwakilan warga meminta kepada Lurah Pondok Kelapa untuk segera mengambil tindakan, agar kegiatan peribadatan yang meresahkan warga tersebut tidak memicu permasalahan lebih lanjut, karena Pengurus Gereja telah melibatkan oknum Ormas sebagai pengamanan pada saat melakukan peribadatan, sehingga warga merasa terintimidasi dengan hal tersebut

Dengan terjadinya konflik tersebut, tindakan nyata yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu dengan mengadakan Rapat Koordinasi pada Jum'at (30 April 2021) yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Lurah, Danramil, Kapolsek, Intelkam, Perwakilan Bagian Hukum, Kanwil Kementerian Agama Pembimas Kristen Kota Adm. Jakarta Timur, Ketua LMK Kel. Pondok Kelapa, FKUB Jakarta Timur (Ketua dan Koord. Bidang Kristen), Perwakilan warga RT. 009/ RW. 011 Kelurahan Pondok Kelapa. Suku

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan dalam rapat yaitu: hendaknya Pimpinan Wilayah dalam hal ini Camat dan Lurah mengambil sikap dengan lebih dulu memastikan kekuatan dan kepastian hukum atas legalitas keberadaan Gereja tersebut, karena seperti kita ketahui bersama bahwa IMB bangunan tersebut yang dibuat pada tahun 1996 adalah sebagai bangunan gedung Sekolah TK, bukan Gereja (Rumah Ibadah); bila belum ada Izin Prinsip pendirian Gereja yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berarti yang dilakukan di tempat tersebut adalah ilegal/ tidak sesuai peruntukannya; Informasi adanya Ormas yang menjadi backing (Pemuda Batak Bersatu dan Pemuda Pancasila) akan ditindak lanjuti dengan pemanggilan untuk klarifikasi. Konflik tersebut sampai saat ini masih dalam proses, walaupun telah mendapatkan persetujuan dari FKUB Kota Jakarta Timur dan Kanwil Kemenag Jakarta Timur akan tetapi masih dalam tahap menunggu persetujuan dari FKUB Provinsi DKI Jakarta (Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, April 2024).

Dari penjelasan di atas mengenai indikator adaptasi diketahui bahwa kemampuan adaptasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur dinilai sudah efektif, hal ini sesuai dengan definisi adaptasi dalam pengukuran efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (2015) adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan untuk mengubah atau menyelaraskan prosedur standar operasinya secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan. Artinya Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur sudah mampu menyelaraskan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Henrikus Wawan Kurniawan (2017), dimana hasil penelitiannya yaitu peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama meliputi; a) sebagai fasilitator, pemerintah memberdayakan dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memfasilitasi pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan serta tokoh agama dalam program pemantapan cinta tanah air dan nasionalisme. B) sebagai koordinator, pemerintah menyelenggarakan

rapat koordinasi dengan FKUB, pengkoordinasian dengan instansi vertikal pemerintahan, pembinaan dan pengkoordinasian camat dan lurah dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) serta koordinasi terkait penyelesaian konflik. C) regulator, pemerintah menerbitkan surat ijin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan rekomendasi FKUB.

5.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Rangka Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur

Dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Jakarta Timur, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut adalah faktor pendukung Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur dalam menjaga kerukunan umat beragama:

1. Anggaran

Anggaran dari pemerintah bagi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hal yang penting, pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik jika ada anggaran yang mencukupi

2. Sarana dan prasarana

Dalam menjalankan suatu program diperlukan sarana dan prasarana pendukung.

3. Dukungan instansi (TNI/ POLRI)

Dukungan dari aparat keamanan di wilayah Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur dan seluruh jajaran Polsek se Jakarta Timur dan juga TNI.

4. Apresiasi dari seluruh stake holder termasuk tokoh agama

Dukungan dari tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, organisasi agama, organisasi masyarakat, LSM, budayawan dan warga yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya merawat kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah masing-masing.

5. Adanya kesatuan serta persaudaraan internal umat beragama, antarumat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah;

6. Adanya visi dan misi bersama tentang pembinaan kerukunan hidup beragama yang lebih dinamis di masa depan, khususnya untuk peningkatan kerjasama nyata dalam menanggulangi masalah-masalah hubungan antarumat beragama;
 7. Adanya wadah silaturahmi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan yang mendukung terciptanya suasana lebih rukun dan harmonis.
 8. Tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama dan memiliki sikap toleransi.
 9. SDM dari Kesbangpol yaitu kemampuan Kesbangpol dalam memfasilitasi semua aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama, kegiatan yang pro masyarakat
- Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain:
1. Arus globalisasi yang semakin tidak terkendali dapat menghambat dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama, dengan menyebarnya berita-berita bohong/ hoax membuat masyarakat mudah terprofokasi dan akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.
 2. Wawasan kebangsaan masyarakat yang menipis, ini dapat pula disebabkan oleh perkembangan yang cepat yang membuat masyarakat menjadi manusia individualis yang tidak memahami pentingnya toleransi dalam bermasyarakat serta hidup rukun antar umat beragama.
 3. Sekelompok atau oknum tertentu ditengah masyarakat yang belum teredukasi dengan baik serta belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 4. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program-program yang diselenggarakan menjadi salah satu faktor pengambat dalam mewujudkan masyarakat hidup rukun.